

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait tata kelola perusahaan dan koneksi politik dengan penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Komisaris independen belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak.
2. Rapat dewan komisaris mampu memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak.
3. Kepemilikan manajerial mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak.
4. Komite audit mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak.
5. Koneksi politik belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak.

Di samping itu, penelitian ini menunjukkan konsistensi yang kuat pada pengujian variabel kontrol dalam model penelitian. Ditemukan adanya pengaruh positif yang signifikan dari variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, serta terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari *leverage* terhadap penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Terdapat keterbatasan pada penelitian ini yang dapat digunakan sebagai pertimbangan akademis bagi penelitian selanjutnya, yaitu terkait perluasan objek pengamatan serta variasi pengukuran pada variabel koneksi politik dan penghindaran pajak. Keterbatasan fokus penelitian yang terdapat pada perusahaan di sektor infrastruktur di BEI menyebabkan karakteristik serta temuan empiris dalam studi ini tidak dapat diekstrapolasikan pada sektor industri lain, seperti perbankan atau pertambangan yang memiliki regulasi perpajakan serta dinamika tata kelola yang berbeda. Selain itu, pengukuran variabel koneksi politik atau proksi penghindaran pajak dalam penelitian ini mungkin belum mampu menangkap bentuk hubungan politik yang lebih kompleks di lapangan secara menyeluruh.

5.2.2 Saran

Peneliti mendatang dapat memperluas ruang lingkup objek penelitian yang diantaranya melibatkan seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di BEI atau mengintegrasikan sektor perusahaan dengan jumlah sampel yang lebih representatif. Di samping itu, penelitian mendatang dapat menguji penggunaan proksi alternatif lain untuk mengestimasi tindakan penghindaran pajak, seperti *Book Tax Differences* (BTD) maupun model ETR lainnya. Lebih lanjut, pendalaman indikator koneksi politik melalui estimasi skor tingkat koneksi politik juga direkomendasikan guna memperoleh gambaran empiris yang lebih komprehensif.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan perspektif baru tentang *Agency Theory* dengan menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan internal tidak selalu linear sebagai alat untuk mengendalikan perilaku oportunistik manajemen. Adanya pengaruh positif kepemilikan manajer dengan komite audit pada temuan penelitian ini menunjukkan adanya efek penguatan di mana kekuasaan dan keahlian yang diberikan kepada agen justru digunakan sebagai jalan untuk meminimalkan pajak demi keuntungan pribadi. Di sisi lain, efektivitas rapat dewan komisaris dan tekanan pihak ketiga (*leverage*) mendukung asumsi teori agensi bahwa pengawasan intensif baik secara internal maupun eksternal mampu mendisiplinkan perilaku agen. Penelitian ini tidak mendukung *Rent-Seeking Theory* dalam konteks perusahaan infrastruktur di Indonesia, di mana perusahaan yang terafiliasi politik cenderung berhati-hati dan menghindari praktik perencanaan pajak yang agresif untuk melindungi reputasi perusahaan mereka.

5.3.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi praktis bagi beberapa pihak seperti regulator, manajemen perusahaan, dan investor jangka panjang.

1. Bagi Regulator (Otoritas Perpajakan)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi otoritas perpajakan baik Direktorat Jenderal Perpajakan maupun Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun kebijakan terkait standar tata kelola perusahaan. Diperlukan

pengawasan ketat terhadap fungsi komite audit serta pemantauan struktur kepemilikan saham oleh manajemen agar fungsi tersebut tidak disalahgunakan sebagai instrumen perencanaan pajak yang terlalu agresif yang dapat merugikan penerimaan negara.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan dalam mencegah manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dapat menjadi evaluasi internal bagi perusahaan terkait diperlukannya batasan dan pengawasan yang ketat terhadap manajemen.

3. Bagi Investor Jangka Panjang

Investor perlu mempertimbangkan aktivitas perencanaan pajak perusahaan yang akan disuntikkan dana. Namun seringkali informasi komprehensif terkait aktivitas manajemen pajak perusahaan tidak tersedia secara umum, sehingga sebagai solusi alternatif investor dapat melihat aspek tata kelola perusahaan sebagai strategi menilai keamanan praktik perpajakan perusahaan.